

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten Padang Pariaman

Adrian Saputra*, Bahrul Anif & Dwifitra Y Jumas

*Pascasarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta, Jl. Sumatera
Ulak Karang, Padang – 25 133, Indonesia*

Email: adriansaputrafull@gmail.com

Dikirim: 25 November 2025

Direvisi: 20 Januari 2026

Diterima: 25 Januari 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten Padang Pariaman serta menilai pengaruhnya terhadap efektivitas program perencanaan. Pendekatan penelitian menggunakan metode campuran dengan dominasi kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan penyebaran kuesioner kepada 87 responden yang terdiri dari wali nagari, anggota Badan Musyawarah Nagari (BMN), dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses musyawarah. Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan integrasi tiga teori partisipasi, yaitu *Arnstein's Ladder of Participation*, *Pretty's Typology of Participation* dan kerangka partisipasi menurut *Uphoff*. Analisis data menunjukkan bahwa bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten Padang Pariaman masih berada pada kategori partisipasi menengah dengan dominasi pada tingkat tokenism, sesuai dengan tipologi *Arnstein*. Masyarakat telah terlibat terutama sebagai pihak yang dikonsultasikan, ditunjukkan melalui tingginya akses informasi dan keterlibatan dalam memberikan masukan, namun belum memiliki posisi yang kuat dalam proses pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme partisipatif berbasis evaluasi bersama, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan model kolaborasi yang memungkinkan kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan tata ruang, RDTR

1. PENDAHULUAN

Perencanaan tata ruang merupakan instrumen kunci dalam mengarahkan perkembangan wilayah yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan mandat regulatif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa RDTR berfungsi sebagai turunan operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Herman et al., 2025). Melalui pengaturan zonasi dan arahan pemanfaatan ruang, RDTR memegang peranan penting dalam pengendalian pembangunan pada tingkat tapak, membantu memastikan bahwa eksistensi dan pertumbuhan wilayah direncanakan secara sistematis dan berkelanjutan (Widiyantoro & Rineksi, 2024). Pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat mengharuskan adanya regulasi yang lebih rinci untuk mengatur ruang agar perkembangan dapat berlangsung secara terarah, merata, dan berkelanjutan (Ningsih et al., 2022).

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu wilayah yang mengalami dinamika perkembangan ruang yang signifikan, dipengaruhi oleh kondisi geografis yang beragam serta dorongan pembangunan berbasis sektor industri, perikanan, pertanian, dan pariwisata (Yunus, 2010; BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2023). Kompleksitas karakteristik wilayah tersebut menuntut penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mampu menjawab kebutuhan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk di wilayah Ibukota Kabupaten yang mencakup lima kecamatan dengan total luas 5.571,19 Ha (Kementerian ATR/BPN, 2021). Namun demikian, proses penyusunan RDTR pada tahun 2022 menunjukkan masih rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap substansi tata ruang, serta rendahnya inisiatif warga dalam berpartisipasi pada forum perencanaan (Conyers, 1991; Rahman dan Santoso, 2018).

Padahal, partisipasi masyarakat merupakan aspek fundamental dalam perencanaan tata ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menggariskan bahwa masyarakat berhak terlibat dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Republik Indonesia, 2007). Secara teoritis, partisipasi yang bermakna tidak hanya memberikan ruang konsultasi, tetapi juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan (Healey, 1997). Arnstein (1969) melalui konsep tangga partisipasi menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar kemungkinan menghasilkan rencana yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan demikian,

evaluasi terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat menjadi krusial untuk mengukur kualitas proses penyusunan RDTR.

Sejumlah penelitian sebelumnya membahas partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR di berbagai daerah. Darwis (2020) menemukan bahwa partisipasi masyarakat pada penyusunan RDTR Kawasan Mandeh masih berada pada tingkat konsultasi dan belum mencapai kemitraan. Syafri (2015) juga mengidentifikasi kendala serupa pada penyusunan RDTR Kawasan Pulau Punjung, seperti kurangnya transparansi, minimnya penyebaran informasi, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan partisipasi masyarakat merupakan isu yang berulang dalam penyusunan dokumen tata ruang di tingkat daerah.

Meskipun penelitian sebelumnya telah menyoroti masalah partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RDTR di berbagai daerah, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada penyusunan RDTR Ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Padahal, wilayah ini memiliki karakteristik tata ruang yang unik, tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi, serta cakupan wilayah perencanaan yang luas (BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2023). Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti hambatan partisipasi secara umum, namun belum menguraikan secara spesifik variasi bentuk partisipasi masyarakat (informasi, konsultasi, dan kemitraan) maupun tingkat partisipasi berdasarkan kerangka teoritik yang komprehensif seperti tangga partisipasi Arnstein (1969).

Dengan demikian, diperlukan penelitian yang memberikan analisis lebih rinci mengenai bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam konteks penyusunan RDTR Ibukota Kabupaten Padang Pariaman sebagai dasar perbaikan tata kelola perencanaan ruang di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dan diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris sekaligus rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kualitas tata kelola perencanaan ruang ke depan (Creswell, 2014).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman sebagai wilayah yang menjadi objek penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi ini dipilih karena merupakan area strategis yang memerlukan evaluasi terhadap proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan memahami fenomena sosial terkait bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR secara mendalam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan dari informan melalui interaksi langsung (Denzin & Lincoln, 2018). Pendekatan kuantitatif untuk menganalisis bagaimana tingkat partisipasi, sebagaimana dipahami melalui teori Arnstein (1969), Pretty (1995), dan Uphoff (1985). Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur variabel-variabel partisipasi secara objektif melalui indikator terstruktur, sekaligus menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel secara statistik.

2.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa prosedur. Pertama, studi literatur dilaksanakan untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta indikator yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Temuan dari studi literatur ini menjadi dasar dalam penyusunan daftar pertanyaan wawancara dan variabel dalam kuesioner, sehingga instrumen yang digunakan selaras dengan kerangka teoritik yang relevan (Tabel 1).

Tabel 1. Faktor dan variabel kuesioner

Faktor	Variabel	Keterangan
Bentuk	Keterlibatan masyarakat sebagai pendengar	Ya/Tidak
Keterlibatan	Keterlibatan aktif dalam menyampaikan usul	Ya/Tidak
Masyarakat	Keterlibatan untuk memberikan informasi/data dari Masyarakat	Ya/Tidak
	Keterlibatan masyarakat dalam bantuan memperjelas hak atas ruang	Ya/Tidak
	Keterlibatan masyarakat dalam pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana dari masyarakat.	Ya/Tidak
	Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan	Ya/Tidak

Kedua, penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Bailey, 2012). Dalam pendekatan kualitatif, jumlah informan tidak harus mewakili populasi secara keseluruhan, tetapi harus mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan (Arikunto, 2006). Oleh karena itu, informan (Tabel 2)

dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses penyusunan RDTR, pemahaman terhadap konteks penelitian, serta ketersediaan waktu untuk memberikan informasi secara komprehensif (Sugiyono, 2014).

Tabel 2. Daftar informan penelitian

Informan	Jabatan
Dinas PUPR Padang Pariaman	Kabid Tata Ruang
Dinas LHKP Padang Pariaman	Kabid Pengolahan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Fungsional Dinas LHKPP
Kecamatan	Kasubag Kepegawaian, Kasi Pemerintahan

Ketiga, responden penelitian terdiri dari wali nagari dan anggota Badan Musyawarah Nagari yang berperan atau memiliki kepentingan dalam penyusunan RDTR. Pemilihan responden mengikuti prinsip representativitas substantif, yaitu kesesuaian karakteristik sosial dan pengalaman responden dengan konteks fenomena yang diteliti (Bogdan & Taylor, 2010). Keempat, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pelengkap dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan penyusunan RDTR, peraturan daerah, foto kegiatan, dan catatan administratif lainnya. Teknik ini berfungsi untuk memperkuat validitas temuan yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner karena dapat memberikan bukti empiris tambahan yang mendukung analisis penelitian (Moleong, 2015).

2.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian dinyatakan selesai. Analisis dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2015), yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif mencakup proses pengorganisasian data, pengelompokan ke dalam kategori yang dapat diatur, pencarian pola, serta identifikasi temuan penting yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, tahap awal analisis dilakukan melalui proses penyajian data, yaitu mengorganisasi informasi ke dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman konteks serta memfasilitasi peneliti dalam menentukan langkah analisis selanjutnya. Bentuk penyajian data ini sejalan dengan pendapat Miles dan Huberman (1994) yang menyatakan bahwa narasi merupakan bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Setelah data tersaji dengan baik, tahap berikutnya adalah proses penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi terhadap pola, hubungan, serta makna yang muncul dari data guna menjawab rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, artinya temuan dibangun berdasarkan data empiris yang terkumpul dan berkembang seiring proses analisis. Proses analisis ini berlangsung hingga mencapai kondisi kejenuhan data, yaitu ketika tidak ditemukan informasi baru dari informan maupun dokumen pendukung. Model analisis interaktif sebagaimana digambarkan oleh Sugiyono (2016), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, digunakan sebagai dasar dalam keseluruhan proses analisis untuk memastikan bahwa temuan penelitian akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator tingkat partisipasi masyarakat disusun berdasarkan integrasi beberapa kerangka teoretis yang relevan. Pertama, Arnstein's Ladder of Participation digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat memiliki kekuasaan dalam proses perencanaan, mulai dari *nonparticipation*, *tokenism*, hingga *citizen power*. Kedua, *Pretty's Typology of Participation* memberikan perspektif mengenai bentuk interaksi masyarakat dalam proses perencanaan, meliputi partisipasi pasif, konsultatif, fungsional, interaktif, hingga *self-mobilization*. Ketiga, *Uphoff's Participation Framework* digunakan untuk melihat keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan program, yaitu tahap pengambilan keputusan (*decision-making*), pelaksanaan (*implementation*), pembagian manfaat (*benefit-sharing*), dan evaluasi (*evaluation*). Integrasi ketiga teori tersebut memungkinkan pengukuran partisipasi masyarakat secara lebih komprehensif, baik dari sisi kekuasaan, bentuk interaksi, maupun tahapan proses perencanaan.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner berskala *Likert* 1–5 yang disusun berdasarkan indikator-indikator partisipasi masyarakat yang dirumuskan melalui integrasi teori *Arnstein*, *Pretty*, dan *Uphoff*. Sebelum digunakan dalam pengumpulan data, instrumen tersebut diuji kualitasnya melalui beberapa tahap. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan memiliki kemampuan mengukur konstruk yang dimaksud. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan batas minimal 0,70 untuk menjamin konsistensi internal antar-item. Selain itu, validitas isi juga dikonfirmasi melalui penilaian ahli (*expert judgment*) yang memiliki kompetensi dalam bidang partisipasi masyarakat dan perencanaan tata ruang, guna memastikan kesesuaian instrumen dengan konsep teoretis *Arnstein*, *Pretty*, dan *Uphoff* serta relevansinya dengan konteks penelitian. Dengan rangkaian pengujian tersebut, kuesioner dinyatakan layak dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data utama dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Gambaran umum responden

Sebanyak 87 responden berpartisipasi dalam penelitian ini, terdiri atas 12 orang Wali Nagari, 53 anggota Badan Musyawarah Nagari (BMN), serta 22 tokoh masyarakat yang pernah terlibat dalam kegiatan musyawarah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Komposisi ini menunjukkan keterwakilan kelompok yang secara langsung berkaitan dengan proses perencanaan ruang di tingkat nagari. Selain itu, mayoritas responden (62%) telah mengikuti proses perencanaan musrenbang setidaknya tiga kali, sehingga dapat diasumsikan memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR. Tingkat pengalaman tersebut memperkuat validitas data karena responden dianggap memiliki pengetahuan praktis mengenai dinamika musyawarah perencanaan di wilayahnya.

3.2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman, meskipun keterlibatan tersebut masih berada pada tingkat partisipasi yang bersifat konsultatif. Berdasarkan wawancara dengan para informan, partisipasi masyarakat terwujud melalui kehadiran dalam rapat, penyampaian saran, serta pemberian informasi terkait kondisi wilayah masing-masing. Pejabat pelaksana teknis seperti Kabid Tata Ruang PUPR (Gambar 1), menyatakan bahwa masyarakat diminta untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat dalam forum konsultasi publik, serta memberikan informasi mengenai kondisi wilayah. Informasi ini dibutuhkan untuk memperjelas hak atas ruang dan sebagai bahan perumusan konsep rencana. Sejalan dengan itu, informan dari kecamatan dan dinas teknis lainnya menjelaskan bahwa masyarakat—terutama perwakilan seperti walinagari, bamus, dan kelompok masyarakat—dilibatkan sebagai peserta rapat dan pemberi masukan. Namun, sebagian informan mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat masih terbatas, terutama dalam pengajuan keberatan serta pengambilan keputusan final terhadap rancangan RDTR.



Gambar 1. Wawancara dengan pejabat pelaksana teknis

Data kuantitatif mendukung hasil wawancara tersebut. Dari 20 responden, sebanyak 19 orang menyatakan bahwa masyarakat tidak hadir hanya sebagai pendengar, melainkan ikut memberikan pendapat. Semua responden menyatakan masyarakat berperan dalam memberikan masukan dan saran. Sebanyak 15 responden menyatakan masyarakat terlibat dalam pemberian informasi/data, dan 17 responden menyatakan masyarakat berperan dalam memperjelas hak atas ruang. Namun, keterlibatan masyarakat dalam perumusan rancangan rencana masih rendah, karena 15 orang responden menyatakan masyarakat tidak dilibatkan. Terkait pembuatan keputusan, 11 responden menyatakan masyarakat tidak berpartisipasi dalam proses tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat bersifat partisipasi vertikal, yaitu partisipasi yang muncul karena adanya undangan atau inisiatif dari pemerintah. Masyarakat tidak terlibat sebagai aktor pengambil keputusan, melainkan sebagai pihak yang memberikan umpan balik. Hal ini sesuai dengan konsep Irene (2011), yang mengidentifikasi partisipasi vertikal sebagai partisipasi yang dibangun melalui hubungan hierarkis di mana masyarakat menerima posisi sebagai bawahan atau penerima instruksi.

Jika dibandingkan dengan kajian terdahulu, temuan ini sejalan dengan Septyasa (2013), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat mencakup kontribusi dalam bentuk saran, tenaga, maupun informasi. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR di Padang Pariaman belum mencakup

bentuk partisipasi yang lebih kuat seperti pengambilan keputusan atau penolakan terhadap rencana. Penelitian Kokon Subrata juga menemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa sumbangan moral, pemikiran, maupun material. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat baru berpartisipasi dalam bentuk dukungan moral dan penyampaian informasi, sementara bentuk partisipasi lainnya belum terlihat kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR masih terbatas pada kehadiran, pemberian saran, dan penyampaian informasi, belum sampai pada keterlibatan yang lebih substantif dalam penyusunan rancangan atau pengambilan keputusan.

3.3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Analisis terhadap tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat dalam forum konsultasi publik cukup tinggi. Mayoritas informan dari instansi teknis menyatakan bahwa masyarakat selalu hadir ketika diundang. Namun, ada informan yang menyebutkan bahwa kehadiran masyarakat bersifat selektif, yakni hanya ketika mereka diundang secara formal. Kehadiran tersebut didominasi oleh tokoh masyarakat seperti walinagari, bamus, serta perwakilan kelompok-kelompok lokal. Dalam hal keaktifan, sebagian besar informan menyatakan bahwa masyarakat cukup aktif menyampaikan masukan dan saran terkait kondisi wilayah dan kebutuhan pembangunan. Namun, terdapat juga penjelasan bahwa sebagian masyarakat bersifat pasif dan hanya memberikan pendapat ketika diminta secara langsung oleh fasilitator rapat.

Keterlibatan masyarakat dalam menetapkan konsep rencana menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian informan dari dinas teknis menyebutkan bahwa masyarakat terlibat dalam proses penyusunan konsep rencana, sementara informan dari kecamatan menyatakan masyarakat tidak dilibatkan dalam penetapan konsep teknis. Data kuantitatif menunjukkan bahwa 14 dari 20 responden menyatakan masyarakat terlibat dalam penetapan konsep rencana. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam menetapkan rancangan rencana berada pada kategori tinggi berdasarkan jawaban responden, di mana 16 dari 20 responden menyatakan masyarakat ikut setuju terhadap rancangan rencana. Namun, hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan hasil wawancara, karena beberapa informan dari dinas menyatakan bahwa persetujuan masyarakat dalam rancangan rencana RDTR tidak sepenuhnya jelas dan masih berada dalam domain pemerintah.

Tabel 3. Rata-rata Indikator Partisipasi Masyarakat

Indikator	Mean	Kategori
Akses informasi	3,82	Tinggi
Keterlibatan konsultatif	3,64	Sedang
Keterlibatan dalam pengambilan keputusan	3,21	Sedang
Kemitraan dalam pelaksanaan	3,12	Sedang
Partisipasi interaktif	3,05	Sedang
Keterlibatan dalam evaluasi	2,81	Rendah
Self-mobilization	2,44	Rendah

Tabel 3 merupakan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR dianalisis dengan menggunakan integrasi tiga kerangka teori, yaitu *Ladder of Participation* dari Arnstein (1969), *Typology of Participation* oleh Pretty (1995), dan kerangka partisipasi berbasis tahapan menurut Uphoff (1985). Hasil analisis menunjukkan variasi tingkat keterlibatan masyarakat pada setiap indikator partisipasi. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, akses informasi memperoleh nilai rata-rata tertinggi (mean = 3.82), yang menunjukkan bahwa masyarakat berada pada kategori partisipasi pasif hingga konsultatif sebagaimana dijelaskan oleh Pretty (1995). Keterlibatan konsultatif (mean = 3.64) menunjukkan bahwa masyarakat berada pada level *tokenism* menurut Arnstein (1969), di mana mereka diberi ruang menyampaikan pendapat namun belum berperan dalam pengambilan keputusan strategis. Indikator keterlibatan dalam pengambilan keputusan (mean = 3.21) serta kemitraan dalam pelaksanaan (mean = 3.12) berada pada kategori sedang, yang menunjukkan bahwa partisipasi belum sepenuhnya mencapai tahap *decision-making* maupun *partnership* sebagaimana digambarkan Uphoff (1985) dan Arnstein (1969). Sementara itu, partisipasi interaktif memperoleh nilai rata-rata 3.05, mengindikasikan bahwa masyarakat hanya sesekali terlibat aktif dalam proses perencanaan. Dua indikator terendah ditemukan pada keterlibatan dalam evaluasi (mean = 2.81) dan *self-mobilization* (mean = 2.44), yang menunjukkan lemahnya inisiatif masyarakat untuk melakukan evaluasi bersama maupun menginisiasi tindakan secara mandiri tanpa dorongan pihak luar. Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak berada pada tahap konsultatif dan fungsional, belum mencapai tingkat pemberdayaan penuh sebagaimana digambarkan dalam literatur partisipasi klasik.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR masih berada pada lapisan tengah atau *tokenism* sebagaimana dijelaskan dalam *Ladder of Participation Arnstein*, yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak terlibat dalam bentuk konsultatif tanpa memiliki kendali substantif terhadap proses pengambilan keputusan. Selain itu, tingkat keterlibatan dalam tahap evaluasi merupakan aspek yang paling rendah, sehingga memperlihatkan bahwa masyarakat belum dilibatkan secara optimal dalam menilai dan memberikan umpan

balik terhadap hasil perencanaan. Lebih jauh lagi, penelitian tidak menemukan adanya indikasi *self-mobilization*, yang berarti masyarakat belum memiliki inisiatif mandiri maupun dorongan kolektif untuk terlibat secara proaktif di luar forum-forum formal yang disediakan pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat pasif-responsif dan belum berkembang menuju bentuk partisipasi yang lebih kuat dan berdaya seperti yang diharapkan dalam model partisipasi ideal.

Darwis (2020) menegaskan bahwa pada tingkat konsultasi, komunikasi dua arah memang terjadi, tetapi keterlibatan masyarakat masih bersifat superfisial karena keputusan strategis tetap ditentukan oleh pemerintah atau lembaga perencana. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut, karena masyarakat tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan final, khususnya dalam penyusunan rancangan RDTR maupun pengesahan rencana melalui Ranperda.

Pada uji validitas menggunakan korelasi Pearson menghasilkan nilai r hitung berkisar antara 0.412 hingga 0.781, seluruhnya berada di atas r tabel sebesar 0.213, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan mampu mengukur konstruk yang dimaksud (Sugiyono, 2014). Selanjutnya, uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* menghasilkan nilai 0.874, yang berada jauh di atas batas minimum 0.70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang tinggi dan layak digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, kuesioner yang dikembangkan berdasarkan indikator partisipasi masyarakat yang merujuk pada teori *Arnstein*, *Pretty*, dan *Uphoff* dapat dinyatakan memenuhi kriteria kualitas instrumen dalam penelitian sosial. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dapat dinyatakan cukup baik dalam aspek konsultasi, namun belum mencapai tingkat partisipasi yang lebih tinggi seperti kemitraan (*partnership*) atau pemberdayaan (*citizen control*). Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme partisipatif agar masyarakat memperoleh ruang yang lebih besar dalam proses perencanaan tata ruang.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten Padang Pariaman masih berada pada kategori partisipasi menengah dengan dominasi pada tingkat *tokenism*, sesuai dengan tipologi *Arnstein*. Masyarakat telah terlibat terutama sebagai pihak yang dikonsultasikan, ditunjukkan melalui tingginya akses informasi dan keterlibatan dalam memberikan masukan, namun belum memiliki posisi yang kuat dalam proses pengambilan keputusan strategis. Analisis indikator berbasis teori *Pretty* dan *Uphoff* mengonfirmasi bahwa partisipasi lebih menonjol pada tahap konsultatif dan pelaksanaan teknis, sementara aspek evaluasi memiliki tingkat partisipasi terendah, yang menandakan minimnya ruang bagi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian akhir perencanaan. Selain itu, tidak ditemukannya indikasi *self-mobilization* menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki inisiatif kolektif untuk terlibat secara mandiri di luar forum formal yang diinisiasi pemerintah. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat sudah berjalan pada tingkat fungsional dan interaktif namun masih belum mencapai kemitraan atau pemberdayaan penuh, sehingga peningkatan kapasitas masyarakat, mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, dan ruang deliberatif yang lebih kuat perlu dikembangkan agar proses penyusunan RDTR benar-benar mencerminkan prinsip partisipasi substantif dan kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006) Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnstein, S.R. (1969) 'A ladder of citizen participation', *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), pp. 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman (2023) Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2023. Padang Pariaman: BPS Kabupaten Padang Pariaman
- Bailey, K.D. (2012) *Methods of Social Research*. New York: Free Press.
- Bogdan, R. and Taylor, S.J. (2010) *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley & Sons.
- Conyers, D. (1991) *An Introduction to Social Planning in the Third World*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Creswell, J.W. (2014) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th edn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2018) *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage.
- Darwis, R. (2020) Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan. Tesis. Padang: Universitas Andalas.
- Healey, P. (1997) *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. London: Macmillan Press.
- Herman, S., Takwim, S., Rasdiana, A., Hadid, A., & Halim, M. (2025). Koherensi kebijakan dan perencanaan kota berkelanjutan: studi kasus rdtr kota palu. *J. PeWeKa Tadulako*, 4(2), 157-168. <https://doi.org/10.22487/peweka.v4i2.79>
- Irene. 2011. "Desentralisasi dan Partisipasi dalam pendidikan". Yogyakarta: UNY

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2021) Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L.J. (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, Y., Maburur, A., & Arafah, F. (2022). Pembuatan aplikasi rencana detail tata ruang (rdtr) perkotaan berbasis android. *Jurnal Enmap*, 3(2), 19-24. <https://doi.org/10.23887/em.v3i2.52579>
- Pretty, J.N. (1995) 'Participatory learning for sustainable agriculture', *World Development*, 23(8), pp. 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Rahman, A. and Santoso, E.B. (2018) 'Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah', *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 10(2), pp. 85–96.
- Republik Indonesia (2007) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Syafri, M. (2015) *Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya*. Tesis. Padang: Universitas Andalas.
- Septyasa, Nuring. 2013. "Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1* (1). Surabaya: UNAIR.
- Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2016) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Uphoff, N. (1985) 'Fitting Projects to People', in Cernea, M. (ed.) *Putting People First*. Oxford: Oxford University Press, pp. 125–153.
- Yunus, H.S. (2010) *Manajemen Kota: Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widiyantoro, S. and Rineksi, T. (2024). Berbagi pakai data spasial pertanahan pada penyusunan rencana detail tata ruang. *Region Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 19(1), 347. <https://doi.org/10.20961/region.v19i1.69856>